



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 165 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penajaman *road map* reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya perkembangan kebijakan mengenai reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Perubahan *Road Map* RB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan *Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2023-2024.
- Ketiga : Perubahan *Road Map* RB digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana aksi reformasi birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Perubahan *Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua memuat:
- a. latar belakang penyusunan Perubahan *Road Map* RB;
 - b. capaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2022;
 - c. tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2023-2024;
 - d. perencanaan reformasi birokrasi general Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2023-2024;
 - e. penetapan tema dan target reformasi birokrasi tematik Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2023-2024;
 - f. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - g. mekanisme *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, materi muatan mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023-2024 dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 165 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen melakukan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks RB BPOM yang sejak tahun 2019 telah mendapatkan kategori “A” atau predikat "Sangat Baik”.

Penerapan RB BPOM sesuai dengan *Road Map* RB BPOM tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024, BPOM perlu menyesuaikan melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024.

Tujuan RB BPOM sesuai dengan tujuan RB nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran RB BPOM yang sesuai dengan sasaran RB nasional terdiri atas: 1) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan 2) budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Untuk RB General, BPOM menerapkan seluruh Kegiatan Utama KU RB General secara *mandatory* untuk tahun 2023-2024. Namun demikian, terdapat prioritas Kegiatan Utama RB General untuk pelaksanaan masing-masing tahun 2023 dan 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunan. Kegiatan Utama RB General yang belum menjadi prioritas di antaranya mempertimbangkan belum tersedia regulasi yang mengatur instrumen evaluasi untuk mengukur indikator Kegiatan Utama RB General dari Kementerian/Lembaga Meso atau *Leading Institution*.

Untuk RB Tematik, BPOM menetapkan 5 (lima) tema dalam penerapan RB Tematik tahun 2023-2024 yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat yang meliputi: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Peningkatan Investasi; 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan *Stunting*; 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan 5) Pengendalian Inflasi.

Pelaksanaan RB BPOM dikelola oleh Tim RB BPOM yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pengelola, dan Tim Evaluator Internal. Tim Pengelola selanjutnya terbagi atas Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik. Tim Pengelola RB General meliputi Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit. Tim Pengelola RB General Pusat dikelompokkan berdasarkan tim kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan keterlibatan langsung dengan Kegiatan Utama terhadap pelaksanaan RB tahun 2023-2024 pada level mikro. Sedangkan untuk tingkat unit kerja, Tim Pengelola RB General Unit merupakan Tim RB unit kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Pengelola RB

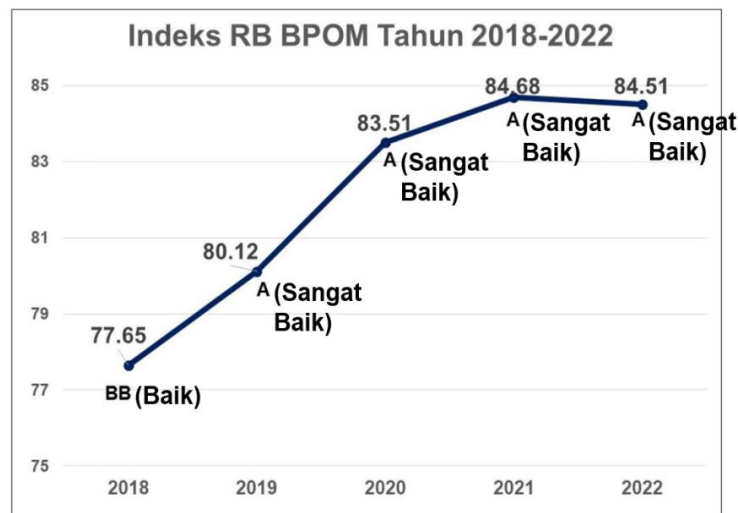
Tematik ditunjuk berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan RB Tematik.

Tim Evaluator Internal merupakan Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik dilaksanakan secara sinergis oleh Tim Pengelola dan Tim Evaluator Internal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu misi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Untuk mewujudkan misi tersebut, BPOM berkomitmen melakukan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks RB BPOM yang sejak tahun 2019 telah mendapatkan kategori “A” atau predikat “Sangat Baik”.



Gambar 1. Indeks RB BPOM Tahun 2018-2022

Penerapan RB BPOM sesuai dengan *Road Map* RB BPOM tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat perkembangan kebijakan mengenai RB sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, BPOM perlu menyesuaikan *Road Map* RB 2020-2024. Oleh karena itu, BPOM perlu melakukan penajaman *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB BPOM Tahun 2020-2024.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Kondisi eksisting sesuai dengan Perubahan *Road Map* RB 2020-2024 Indeks RB BPOM Tahun 2022 mendapat predikat yang sama seperti tahun sebelumnya dalam kategori “A” atau predikat "Sangat Baik". Namun, terdapat penurunan nilai Indeks RB BPOM tahun 2022 dengan nilai 84,51 dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 84,68. Hasil pelaksanaan RB BPOM tahun 2022 tersaji dalam tabel tujuan dan sasaran strategis RB BPOM tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis RB BPOM

Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Skala	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Renstra BPOM 2024*	Kondisi Eksisting 2022	Penyesuaian Target 2024	Keterangan
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	0-100	Baik (>70 - 80)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (84,51)	Sangat Baik (86)	Penyesuaian target 2024 mempertimbangkan realisasi kondisi eksisting 2022 dan adanya perubahan instrumen evaluasi RB
	<i>Capaian Indikator Kinerja Pembangunan:</i>						
	Persentase Obat yang memenuhi syarat		94.75	94.75	89.73	94.75	Indikator Kegiatan Prioritas berdasarkan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024
	Persentase makanan yang memenuhi syarat		86	86	85.21	86	Indikator Kegiatan Prioritas berdasarkan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Skala	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Renstra BPOM 2024*	Kondisi Eksisting 2022	Penyesuaian Target 2024	Keterangan
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah,	Indeks SPBE	0-5	Baik (2,60 - <3,50)	Baik (3,17)	Baik (3,12)	Sangat Baik (3,50)	Penyesuaian target mengacu pada dokumen

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Skala	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Renstra BPOM 2024*	Kondisi Eksisting 2022	Penyesuaian Target 2024	Keterangan
	Kolaboratif, dan Akuntabel							revisi renstra satker Pusdatin
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	0-120	Baik (90 - 110)	-	Baik (97,64)	Baik (100)	Penyesuaian target mengacu target nasional pada Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	-	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	0-100	80	-	93	95	Penyesuaian target mengacu pada dokumen revisi renstra satker Ittama
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	N/A	7.66%	N/A	N/A	-	
		Indeks Implementasi BerAKHLAK	0-100	67.14	-	61.2	67.14	Penyesuaian target mengacu target nasional pada Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023
		Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	0-100	81.10	-	84.04	85.25	Target disesuaikan dengan realisasi kondisi eksisting
		Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	88.06	91.29	90.83	-	

*Keterangan: Target Renstra BPOM 2024 mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

A. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Tujuan RB BPOM sesuai dengan tujuan RB nasional yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Hal ini juga berlaku pada sasaran RB BPOM yang sesuai dengan sasaran RB nasional terdiri atas:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel; dan
2. Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

B. Perencanaan RB General

BPOM menerapkan seluruh Kegiatan Utama RB General secara *mandatory* untuk tahun 2023-2024. Namun demikian, terdapat prioritas Kegiatan Utama RB General untuk pelaksanaan masing-masing tahun 2023 dan 2024 (kegiatan prioritas ditandai dengan warna hijau) yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunan. Untuk Kegiatan Utama RB General yang belum menjadi prioritas di antaranya mempertimbangkan belum tersedia regulasi yang mengatur instrumen evaluasi untuk mengukur indikator Kegiatan Utama RB General dari Kementerian/Lembaga Meso atau *Leading Institution*. Kegiatan Utama RB General BPOM Tahun 2023-2024 sebagaimana Anak Lampiran 1.

C. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

BPOM menetapkan 5 (lima) tema dalam penerapan RB Tematik tahun 2023-2024 yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat. Rincian pelaksanaan RB Tematik BPOM sebagai berikut:

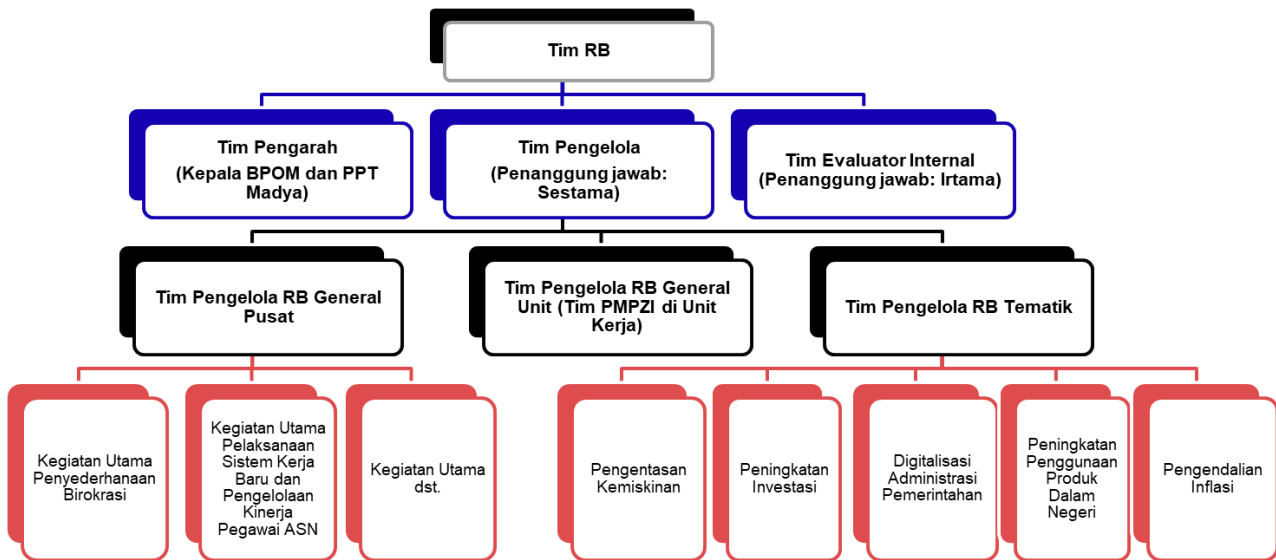
1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
BPOM melaksanakan Program Prioritas Aktual Presiden berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan *Stunting*)
BPOM merupakan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* yang mendapatkan mandat dan tanggung jawab untuk mendukung dengan intervensi sensitif dalam penurunan *stunting* melalui digitalisasi tata kelola percepatan perbaikan gizi masyarakat. Penanganan *stunting* merupakan *tagging* Prioritas Nasional (PN) BPOM dan sesuai Proyek Prioritas Nasional Penurunan *Stunting*.
3. Peningkatan Investasi
BPOM sesuai tugas dan fungsinya sebagai *Non-Implementing Agency* untuk peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing pelaku usaha sektor Obat dan Makanan.
4. Pengentasan Kemiskinan
BPOM sesuai tugas dan fungsinya merupakan *Non-Implementing Agency* melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor Obat dan Makanan.
5. Pengendalian Inflasi
BPOM sesuai tugas dan fungsinya merupakan *Non-Implementing Agency* yang berkontribusi terhadap peningkatan kelancaran distribusi produk Obat dan Makanan.

Tema dan Target RB Tematik BPOM Tahun 2023-2024 sebagaimana Anak Lampiran 2.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

A. Pelaksanaan RB

Manajemen pelaksanaan RB BPOM ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Indeks RB BPOM Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2 pelaksanaan RB BPOM dikelola oleh Tim RB BPOM sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas Kepala BPOM dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2. Tim Pengelola

Penanggung jawab Tim Pengelola RB merupakan Sekretaris Utama. Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, Kepala Biro Hukum dan Organisasi sebagai Ketua Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB Tematik. Tata kelola RB pada BPOM melalui digitalisasi menggunakan *rb.pom.go.id*.

Tim Pengelola terdiri atas:

a. Tim Pengelola RB General

Tim Pengelola RB General meliputi Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit. Tim Pengelola RB General Pusat dikelompokkan berdasarkan tim kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan keterlibatan langsung dengan kegiatan utama terhadap pelaksanaan RB tahun 2023-2024 pada level mikro sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Pengelola RB General disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal serta kebutuhan percepatan pencapaian RB Mikro. Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja, BPOM tidak mempunyai struktur organisasi Sekretariat Deputi sehingga pejabat pengawas Kepala Subbagian Kesekretariatan pada setiap Eselon I tergabung dalam Tim Pengelola RB General Pusat. Selanjutnya, Tim RB Unit Organisasi Eselon I diintegrasikan dengan Tim Pengelola RB General Pusat dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- 1) mulai tahun 2023 tidak dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) tingkat unit organisasi eselon I;
- 2) evaluasi RB yang lebih berfokus pada hasil dibandingkan proses;

- 3) penajaman pada Tim Pengelola RB Tematik; dan
- 4) sebagian besar indikator kegiatan utama RB General telah tersinkronisasi dengan indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis BPOM dan unit kerja sehingga dapat diimplementasikan secara efektif.

Sedangkan untuk tingkat unit kerja, Tim Pengelola RB General Unit merupakan Tim RB unit kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Tim Pengelola RB Tematik

Tim Pengelola RB Tematik ditunjuk berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan RB Tematik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang meliputi: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Peningkatan Investasi; 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting; 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan 5) Pengendalian Inflasi.

3. Tim Evaluator Internal

Tim Evaluator Internal merupakan Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan evaluasi internal.

B. Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi RB

Digitalisasi *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB dan rencana aksi Agen Perubahan dilakukan secara berkala melalui *e-monevrb.pom.go.id*. Mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik dilaksanakan secara sinergis oleh Tim Pengelola dan Tim Evaluator Internal sebagai berikut:

1. Tim Pengelola RB General Pusat

- a. melakukan *monitoring* secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan RB General; dan
- b. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan RB General.

2. Tim Pengelola RB Tematik:

- a. melakukan *monitoring* secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan RB Tematik; dan
- b. menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi internal dan eksternal pelaksanaan RB Tematik.

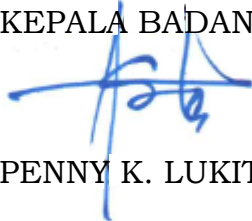
3. Tim Evaluator Internal:

- a. melakukan reвью atau evaluasi perencanaan (*ex-ante*) terhadap penyusunan *Road Map* dan rencana aksi pelaksanaan RB;
- b. melakukan *monitoring*, mengukur ketercapaian target, dan menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi pelaksanaan (*on going*) serta menilai kualitas pengelolaan RB General dan RB Tematik secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- c. memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan RB General dan RB Tematik kepada Tim Pengelola RB BPOM; dan
- d. menyampaikan ringkasan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Evaluator Nasional melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB V
PENUTUP

Penajaman pada *Road Map* RB BPOM tahun 2020-2024 merupakan strategi percepatan dalam rangka mencapai tujuan RB untuk terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Melalui upaya-upaya pelaksanaan strategi RB General dan RB Tematik tahun 2023-2024 diharapkan BPOM dapat mencapai sasaran RB untuk terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

ANAK LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 165 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI GENERAL BPOM TAHUN 2023-2024

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
Sasaran Strategis 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel											
1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Persentase tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit kerja
2	Terimplementasinya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Persentase tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Biro SDM	Seluruh unit kerja
3	Terimplementasinya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	0-5	2.91	3.12	3.30	3.50	Indikator KU terdapat pada Renstra BPOM dan Pusdatin	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh unit kerja
			Tingkat implementasi inisiatif strategi Arsitektur SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
4	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan AKIP	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh unit kerja
			Nilai SAKIP	0-100	Memuaskan (80.33)	Memuaskan (80.18)	Memuaskan (83)	Memuaskan (83)	Indikator KU terdapat pada Renstra BPOM dan seluruh satker		
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0-100	35.48	5	20	20	Target tahunan disesuaikan dengan target nasional	Inspektorat Utama	Seluruh unit kerja
6		Penguatan implementasi SPIP	Tingkat maturitas SPIP	0-5	3.639	3.732	3.85	4	1. Indikator KU terdapat pada Renstra Ittama 2. Penyesuaian target 2023 mempertimbangkan realisasi kondisi eksisting 2022 dan adanya perubahan metodologi penilaian	1. Inspektorat Utama 2. Sekretariat Utama	Seluruh unit kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
7		Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR)	0-100	100	89.09	89.5	90	Indikator KU termasuk dalam indikator layanan pengaduan dan informasi yang terdapat pada Renstra Settama	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)
8		Penguatan upaya pencegahan korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	0-100	86.91	84.04	85	85.25	-	Inspektorat Utama	Seluruh unit kerja
9	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	Tata kelola kebijakan publik	Indeks Kualitas Kebijakan	0-100	78.64	78.64	82.43	82.43	Indikator KU terdapat pada Renstra BPOM dan Deputi I, II, III	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Pusat Analisis Kebijakan dan Makanan	Direktorat Standardisasi pada Deputi I, II, dan III
10		Pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	0-100	N/A	96.25	96.25	96,40	-	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit kerja
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Pelaksanaan arsip digital	Tingkat digitalisasi arsip	0-100	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Biro Umum	Seluruh unit kerja


No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
12	arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	0-5	N/A	N/A	Baik (2,60 - <3,50)	Baik (2,60 - <3,50)	Target tahunan disesuaikan dengan target nasional	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh unit kerja
13	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah,	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0-100	70.88	79.70	78	80	3. Indikator KU terdapat pada Renstra Settama 4. Target disesuaikan dengan adanya perubahan metodologi penilaian	Biro Umum	Seluruh unit kerja
14	pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator KU terdapat pada Renstra BPOM	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh unit kerja
			Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	0-100	94.24	93	94	95	Indikator KU terdapat pada Renstra Ittama		
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	95.72	96.64	95.57	95.92	Indikator KU merupakan komponen pembentuk		

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
									dalam indikator Nilai Kinerja Anggaran yang terdapat pada Renstra BPOM dan seluruh satker		
			Indeks Pengelolaan Aset	0-4	2.93	3.32	3	3.01	1. Indikator KU terdapat pada Renstra Settama 2. Target disesuaikan dengan adanya penambahan satker		
Sasaran Strategis 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional											
15	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan transformasi Jabatan Fungsional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Biro SDM	Seluruh unit kerja
16	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Biro SDM	Seluruh unit kerja

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
17	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Biro SDM	Seluruh unit kerja
18	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0-400 (0,20-1,00)	364 (0,88)	387,50 (0,94)	387,50 (0,94)	388 (0,94)	Indikator KU terdapat pada Renstra Settama	Biro SDM	Seluruh unit kerja
19		Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	0-100	N/A	61.2	65	67.14	Target tahun 2024 disesuaikan dengan target nasional	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	Seluruh unit kerja
			Nilai Survei Employer Branding	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-		
20		Pelayanan Publik Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	89.80	90.83	90.35	91.29	1. Indikator KU terdapat pada Renstra BPOM dan seluruh satker UPP 2. Target disesuaikan dengan adanya penambahan UPP	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Capaian		Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2021	Baseline (2022)	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
			Indeks Pelayanan Publik	0-5	4.51	4.56	4.51	4.51	1. Indikator KU terdapat pada Renstra BPOM dan seluruh satker UPP 2. Target disesuaikan dengan adanya perubahan metodologi penilaian		

*Keterangan:

 : Prioritas Kegiatan Utama


ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 165 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK BPOM TAHUN 2023-2024

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk Dalam Negeri	Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	36.50	38	40	Target tahun 2024 disesuaikan dengan target nasional	Biro Umum	Seluruh unit kerja
2	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan <i>Stunting</i>)	Penurunan <i>stunting</i> melalui digitalisasi tata kelola percepatan perbaikan gizi masyarakat	Persentase sampel pangan fortifikasi yang dilaporkan melalui sistem informasi pelaporan terpadu	0-100	100	100	100	1. Intervensi sensitif BPOM sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan <i>Stunting</i> 2. Penurunan <i>Stunting</i> merupakan <i>tagging</i> Prioritas Nasional (PN) BPOM	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2. Direktorat Registrasi Pangan Olahan 3. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 4. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 5. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 6. Seluruh UPT Balai Besar/Balai/Loka POM

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Skala	Baseline	Target Tahunan		Keterangan	Unit Kerja Pelaksana	
					2022	2023	2024		Koordinator	Pelaksana
3	Peningkatan Investasi	Meningkatnya kemudahan berusaha dan daya saing pelaku usaha sektor Obat dan Makanan	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	0-100	Sangat Baik (80-100)	Sangat Baik (80-100)	Sangat Baik (80-100)	Sumber data: Kementerian Investasi/BKPM	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)
4	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	0-100	73.11	79	81	Tagging Prioritas Nasional (PN)	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 2. Seluruh UPT Balai Besar/Balai/Loka POM
5	Pengendalian Inflasi	Meningkatnya kelancaran distribusi Obat dan Makanan	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	0-100	73.76	71.78	74.07	1. Tagging Prioritas Nasional (PN) 2. Target tahun 2023 disesuaikan dengan adanya perubahan metodologi penilaian	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	1. Direktorat Pengawasan pada Deputi I, II, dan III 2. Seluruh UPT Balai Besar/Balai/Loka POM

*Keterangan:

 : Prioritas Kegiatan